

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025



**PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
JL. PINANG BARIS NO.114**





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Pinang Baris No. 114, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8458994 - 8452022, Faksimile (061) 8452022,
Laman dlh.pemkomedan.go.id, Pos-el dlh@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
NOMOR : 000.7.2.6 / 2494

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Renja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dalam keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 1 tahun 2023 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
10. Peraturan Daerah Kota Medan No. 8 Tahun 2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah;

12. Keputusan Wali Kota Medan nomor : 900/25.K tanggal 28 November 2023 tentang Pejabat yang diberi Wewenang Selaku Pelaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Pemerintahan Kota Medan;
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 42 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

MEMUTUSKAN

Menimbang : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

I. Pelaksana Kegiatan

- a) Pengarah Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

c. Anggota :

1. Sekretaris :

- a) Kepala Sub bagian Perlengkapan dan Umum;
- b) Kepala Sub Bagian Penyusun Program;
- c) Ketua Tim Kerja Lingkup Keuangan;
- d) Staf Jabatan Fungsional; dan

2. Kepala Bidang Tata Lingkungan :

- a) Ketua Tim Kerja Lingkup Inventarisasi, Perlindungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- b) Ketua Tim Kerja Lingkup Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- c) Staf Jabatan Fungsional; dan

3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 :

- a) Ketua Tim Kerja Lingkup Pengurangan Sampah;
- b) Ketua Tim Kerja Lingkup Penanganan Sampah;

- c) Ketua Tim Kerja Lingkup Limbah B3;
 - d) Staf Jabatan Fungsional; dan
4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup :
 - a) Ketua Tim Kerja Lingkup Pemantauan Lingkungan;
 - b) Ketua Tim Kerja Lingkup Pencemaran Lingkungan;
 - c) Ketua Tim Kerja Lingkup Kerusakan Lingkungan;
 - d) Staf Jabatan Fungsional; dan
 5. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup :
 - a) Ketua Tim Kerja Lingkup Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 - b) Ketua Tim Kerja Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan;
 - c) Ketua Tim Kerja Lingkup Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - d) Staff Jabatan Fungsional; dan
 6. UPT

KEDUA

: Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun :

1. Pengarah mempunyai tugas pokok :
Mengkoordinasikan dan memfasilitasi serta mengawasi dan memantau keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024.
2. Ketua mempunyai tugas pokok :
 - a. Bertanggung jawab terhadap Pengarah Kegiatan dalam menjalankan arahan dan petunjuk mendukung
 - b. Melaksanakan arahan, petunjuk dari Pengarah terhadap Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kotqa Medan Tahun 2024;
 - c. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pengarah selaku pengguna anggaran secara berkala serta melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan tersebut.

3. Anggota mempunyai tugas pokok :
 - a. Membantu Ketua dalam menyelesaikan draft Penyusunan Renja 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Kota Medan Tahun 2024;
 - b. Membantu Ketua dalam menjalankan seluruh kegiatan;
 - c. Membantu Ketua mempersiapkan proses administrasi yang diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir apabila tugas-tugas telah selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M E D A N
Pada tanggal : 18 Juli 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Muhammad Husni, SE, M.Si
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP 196807051995031002

Tembusan :

1. Bapak Wali kota Medan (sebagai laporan);
2. Personil yang bersangkutan;
3. Peringgal.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 Tahun Anggaran 2024. Dokumen Renja merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025. Penyusunan Renja merupakan penjabaran dari Peraturan Walikota Medan nomor 99 Tahun 2023 tentang Renstra 2021-2026 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pelaksanaan Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Renja menjabarkan tentang tujuan, sasaran, target, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Akhirnya kami berharap melalui penyusunan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan selama satu tahun terakhir agar ke depan dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya terkait lingkungan hidup dengan mengedepankan inovasi dan kreasi guna meningkatkan kinerja dalam melayani publik.

Medan, 30 Agustus 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Muhammad Husni, SE., MSi.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP 19680705 199503 1 002

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.3.1. Maksud.....	8
1.3.2. Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup	12
2.1.1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tabel TC 29	19
2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra OPD	40
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	41
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	41
2.4 Isu-lisu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	46
2.5 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	47
2.6 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024	50
2.7 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
2.8 Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN	60
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	60
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	68
4.1. Program dan Kegiatan	68
BAB V PENUTUP.....	85

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Komposisi Pegawai DLH Kota Medan	4
TABEL I.2	Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan	5
TABEL I.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan.....	5
TABEL II.1	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	13
TABEL II.2.	Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2024	14
TABEL II.3	Kondisi BAU dan target Penurunan GRK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020.....	15
TABEL II.4.	Emisi Gas Rumah Kaca 2021 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup.....	16
TABEL II.5.	Aksi Mitigasi Usulan dan Rencana	16
TABEL II.6.	Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2023 Periode II.....	19
TABEL II.7	(TC. 29) Evaluasi Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2022	20
TABEL II.8	(TC.30) Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan	41
TABEL II.9	Capaian Kinerja Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Tahun 2023	42
TABEL II.10	Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2024 Kota Medan Dinas Lingkungan Hidup	44
TABEL II.11	Usulan Musrenbang Kecamatan Kota Medan Tahun 2024 ...	51
TABEL II.12.	Data Gender Pada Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2023.....	58
TABEL III.1	Visi, Misi, Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi , Arah Kebijakan	63
TABEL III.2	Rencana Kerja Dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2024 (Tahun Berjalan)	64
TABEL IV.1	Rumusan Rencana Program Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.....	73

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Daerah Kota Medan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Pemerintah Daerah Kota Medan dan terjabar dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Medan sesuai Perwal Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 74 dan pasal 126 mengamanatkan bahwa tahapan awal dalam penyusunan Renja adalah disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2025. Rencana Kerja tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Penjabaran Visi Misi Walikota dalam RPJMD Kota Medan, sehingga program dan kegiatan prioritas Walikota dapat tertampung pada Rencana Kerja dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah.
2. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Artinya, apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya jangan sampai mengalami penurunan pada tahun ini. Dengan demikian semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Lingkungan Hidup dapat lebih optimal.
3. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan

pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pernyataan tersebut dapat diartikan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Lingkungan Hidup. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2023 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2024.

4. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik.
5. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota Medan tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 merupakan penjabaran dari skema Perubahan RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2024 serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tahun 2021 – 2026 yang dikarenakan ada perubahan nomenklatur Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasar Perwal 97 Tahun 2022 mengharuskan adanya revisi Renstra untuk Tahun 2024-2026.

Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen

Pemerintah bersama DPRD.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Medan Tahun 2025.

Jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan yang selanjutnya disingkat DLH Kota Medan pada Agustus 2024 sebanyak 114 orang berstatus PNS dan 181 orang berstatus Pegawai Harian Lepas (PHL).

TABEL I.1
Komposisi Pegawai DLH Kota Medan

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	0	1
2	Sekretaris Dinas	0	1	1
	2.1 Sub Bagian Perlengkapan dan Umum	0	1	1
	2.2 Sub Bagian Program	0	1	1
3	Ka. Bidang Tata Lingkungan	0	1	1
4	Ka. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	0	1	1
5	Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1	0	1
6	Ka. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1	0	1
7	7.1 Kepala UPT. Laboratorium Lingkungan	0	1	1
	7.2 Kepala TU UPT Laboratorium Lingkungan	1	0	1
8	Jabatan Fungsional	4	6	10
9	Pelaksana	50	44	94
10	Tenaga Honorer	128	53	181
Total Pegawai		186	109	295

Sumber : Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Keseluruhan Berjumlah 295 orang terdapat :

- 114 (seratus dua puluh satu) orang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 181 (seratus delapan puluh satu) orang berstatus Tenaga Honorer.

TABEL I.2
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

No	Uraian	No	Uraian
1	0 Orang berpendidikan S-3	5	2 Orang berpendidikan D-1
2	24 Orang berpendidikan S-2	6	113 Orang berpendidikan SMA
3	115 Orang berpendidikan S-1	7	12 Orang berpendidikan SMP
4	16 Orang berpendidikan D-3	8	9 Orang berpendidikan SD

TABEL I.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan DLH Kota Medan									
		Kepala	Sekretariat	Subbag Perlengkapan dan Umum	Subbag Penyusunan Program	Bidang Tata Lingkungan	Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Bidang Pengelolaan Sampah dan B3	Bidang Penataan dan peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	UPT	Total
1	Pegawai Negeri Sipil										
	Strata-2	1	2	1	1	5	5	2	6	1	24
	Strata-1		3	6	1	12	12	17	14	1	66
	Diploma-4										
	Diploma-3		1			1		1	1		4
	Diploma-1										
	SMU/Sederajat		1	5	1			9	1		17
	SMP/Sederajat										
	SD/Sedrajat							3			3
2	Honoror										
	Strata-1		9	11	1	1	2	23	2		49
	Diploma-3			1	1	1		8	1		12
	Diploma-1						1	1			2
	SMU/Sederajat		22	7				65	2		96
	SMP/Sederajat		2					10			12
	SD/Sederajat		1					5			6
	Jumlah	1	42	31	5	20	20	147	27	2	295

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yg sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yg sebagaimana telah diubah menjadi PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
15. Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

20. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan;
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 - 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud dari Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan :

1. Sebagai dokumen awal perencanaan pembangunan Kota yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang di sertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

2. Memberikan arah pedoman penyusunan program, Kegiatan dan sub kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
3. Sebagai Komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan tentang arah perencanaan pembangunan kedepannya.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 Tahun Anggaran 2024 ini adalah :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan kota yang transparan dan akuntabel dengan meningkatkan kualitas dan intensitas koordinasi antar Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan kota agar lebih terarah, efektif dan efisien.
3. Mendukung program Walikota Medan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 Tahun Anggaran 2024, disusun dengan sistematis penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang :

Latar Belakang, pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Dasar Hukum, memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.

Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang :

Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2023 mengacu pada APBD yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.

Capaian Program Tahun 2023 berisikan pencapaian program Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk tahun 2023 dan program kegiatan dan sub kegiatan apa yang tidak dilaksanakan beserta alasannya.

Capaian Penetapan Kinerja (TAPKIN) berisikan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta berdasarkan Ketetapan Kinerja (TAPKIN).

Analisis Kinerja Pelayanan OPD berisikan pencapaian kinerja pada aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian tentang proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses perbandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi tentang :

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Program dan Kegiatan berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah berisi Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB V PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Capaian Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah menyusun anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melaksanakan sebanyak 11 program, 20 kegiatan, dan 60 sub kegiatan. Pada tahun 2023, anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sebesar Rp 109.323.105.037 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 95.039.610.342 dengan persentase realisasi sebesar 86,93 %. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD dan Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023 sebagaimana dalam Tabel II.1

TABEL II.1
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Secara Terkendali dan Partisipasif	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,89	63,67	102,876 %	Tercapai
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	14,45%	15,98%	110,59%	Tercapai
2.	Meningkatnya Cakupan Area Pelayanan Persampahan	Persentase Penanganan Persampahan yang dikelola di TPA	73%	71,19%	102,55%	Tercapai
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	15%	16,33%	108,86%	Tercapai
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga	27%	13,01%	48,18%	Belum Tercapai

1. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah : Indikator Kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai informasi yang mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan Hidup (IKLH) terdiri dari 3 indikator yaitu :

- a. Indikator Kualitas Air (IKA) Yang di ukur berdasarkan parameter TSS, PH, BOD, COD, DO, Nitrat (sebagai N) dan Fecal Caliform.
- b. Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂.
- c. Indeks Kualitas Lahan (IKL) di ukur berdasarkan luas tutupan lahan bervegetasi

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan tersebut.

TABEL II.2
Kriteria dan Parameter IKLH periode 2020-2024

No	Kriteria	Parameter	Bobot
1	Kualitas Air Sungai	Derajat Keasaman (PH)	37,60%
		Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	
		Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	
		Oksigen Terlarut (DO)	
		Nitrat sebagai N (NO ₃ -N)	
		Total Phospat sebagai P (T-po ₄)	
		Padatan Tersuspensi Total (TSS)	
2	Kualitas Udara	SO ₂	40,50%
		NO ₂	
3	Kualitas Lahan	Tutupan Vegetasi Hutan (hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan tanaman)	21,90%
		Tutupan Vegetasi Non Hutan (belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota, dan rehabilitasi hutan dan lahan (di APL)	

Sumber : SE MENLHK, 318/2020

2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% atau 834 juta ton CO₂eq pada tahun 2030 dari kondisi Business As Usual (BAU). Berdasarkan Peraturan Presiden No 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon; diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pembiayaan dan investasi hijau yang berdampak pada penurunan emisi GRK. Dalam dokumen pembaruan NDC yang telah disampaikan pada UNFCCC pada Juli 2021 Indonesia berkomitmen untuk mencapai penurunan emisi GRK sebanyak 41% pada tahun 2030 dengan dukungan Internasional.

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi GRK ini secara umum bertujuan untuk:

- # Mengetahui dan memantau tingkat emisi GRK emisi Gas Rumah Kaca (GRK) per sektor;
- # Merancang dan mengevaluasi kegiatan mitigasi perubahan iklim;
- # Menyusun laporan status emisi GRK Kota Medan;
- # Menyusun target pencapaian penurunan emisi GRK.

Pergub Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, disebutkan bahwa target penurunan sebesar 24,8% dari BAU hingga tahun 2020. Target penurunan emisi GRK meliputi 5 sektor prioritas : pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi yang meliputi transportasi dan industri, serta pengolahan limbah.

TABEL II.3
Kondisi BAU dan target Penurunan GRK Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2020

No	Sektor	Kondisi Emisi 2010 (tco ₂ eq)	Baseline BAU 2020 (tCO ₂ eq)	Mitigasi GRK (tCO ₂ eq)	Perkiraan Penurunan GRK 2020 terhadap Total BAU (%)
1	Pertanian	9.324.598,5	11.727.942,2	5.183.979,0	2,0
2	Kehutanan dan lahan Gambut	139.132.277,0	187.871.098,0	31.027.594,7	12,2
3	Energi	8.383.000,0	22.098.000,0	5.316.000,0	2,5
4	Transportasi	5.299.200,0	10.861.300,0	4.540.000,0	1,8
5	Industri	7.659.900,0	16.266.210,0	12.037.000,0	4,7
6	Pengolahan Limbah	2.092.016,0	5.315.858,0	3.947.409,0	1,6
Total Emisi		163.507.991,5	254.140.408,2	63.081.982,7	24,8

Sumber : Pergub Prov. Sumatera Utara No. 36/2012

TABEL II.4
Emisi Gas Rumah Kaca 2021 – 2026
Dinas Lingkungan Hidup

Sektor	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ENERGI	1.165.687	1.239.152	1.317.604	1.401.400	1.490.923	1.586.587
Transportasi	1.688.160	1.873.858	2.079.982	2.308.780	2.562.746	2.844.648
IPPU	171.755	70.932	29.603	12.666	5.731	2.898
AFOLU	19.922	18.885	18.446	18.493	18.945	19.743
LIMBAH	340.160	372.317	407.861	447.256	491.057	539.935
TOTAL	3.385.684	3.575.144	3.853.496	4.188.595	4.569.402	4.993.810
		189.461	278.352	335.099	380.807	424.408
		0,055959324	0,077857566	0,086959743	0,090915119	0,092880451

TABEL II.5
Aksi Mitigasi Usulan dan Rencana

SEKTOR	2022	2023	2024	2025	2026
ENERGI	1.868	2.263	2.503	2.744	2.985
Transportasi	462.348	559.033	655.652	752.270	848.889
IPPU					
PERTANIAN	166	332	498	664	830
LAHAN	3.397	3.397	3.397	3.397	3.397
LIMBAH	44.905	50.655	56.586	62.540	68.513
TOTAL	512.684	615.679	718.636	821.615	924.613
%	14,34%	15,98%	17,16%	17,98%	18,52%
	14,34%	1,64%	1,18%	0,82%	0,53%

3. Persentase Penanganan Persampahan yang Dikelola di TPA

Penanganan persampahan meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Persentase penanganan persampahan yang dikelola TPA merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana penanganan sampah di lingkungan masyarakat yang terangkut sampai dan dikelola TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Tahun 2023 penanganan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 73%. Timbulan sampah tahun 2023 awal 621.978,469 ton. Timbulan sampah akhir 2023 sebesar 645.661,28 ton. Sampah yang masuk ke TPA 459.633,56 ton sehingga $(459.633,56 \text{ ton} / 645.661,28 \text{ ton}) \times 100\% = 71,19\%$.

Target penanganan persampahan yang dikelola di TPA sampai tahun 2026 adalah 70%. Semakin sedikit penanganan persampahan yang dikelola di TPA semakin baik dengan asumsi pengelolaan ditingkat rumah tangga semakin besar.

4. Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari Tahun Sebelumnya

WRS merupakan orang pribadi atau badan yang berkewajiban untuk membayar Retribusi Pelayanan Kebersihan. Indikator ini menunjukkan adanya persentase peningkatan jumlah WRS pada daerah Wilayah Kota Medan. Pengelolaan WRS dilakukan dengan prinsip kolaborasi antara DLH dengan 21 kecamatan dengan melibatkan 151 Kelurahan sekota Medan. Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Perwal Kota Medan Nomor 18 Tahun 2021 bahwa pengelolaan persampahan dilimpahkan kepada 21 kecamatan se Kota Medan dan pengutipan WRS dengan penetapan tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 8 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan. Target tahun 2023 kenaikan WRS sebesar 15 % terealisasi 16,33%. Total WRS Desember akhir 2022 sebanyak 87.735 WRS sedangkan akhir Desember 2023 sebanyak 102.063 WRS

5. Persentase Pengurangan Sampah atau Pengelolaan Persampahan di Tingkat Rumah Tangga

Persentase pengurangan sampah atau pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga merupakan indikator kinerja yang menunjukkan sejauh mana pengurangan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat/tingkat rumah tangga dalam kegiatan pengelolaan persampahan. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan, pendaurulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah yang dihasilkan pada lingkungan masyarakat. Jika merujuk pada Peraturan Walikota Medan Nomor 26 tahun 2019 tentang kebijakan dan Strategi Daerah Kota Medan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, ditetapkan bahwa tahun 2023 pengurangan sampah di Kota Medan ditargetkan sebesar 27%.

Pengurangan sampah 2023 selama 1 tahun sebesar 83.990,38 ton sehingga $(83.990,38/645.661,28) \times 100\% = 13,01\%$ capaian tersebut tidak sesuai dengan target yang ditetapkan (sumber : data SIPSN 2023 periode 1).

Kedepan perlu inovasi-inovasi yang ditingkatkan serta peningkatan peranan dari Bank Sampah, TPS / TPS-3R, TPST, Rumah Kompos (Composting Center), kerjasama dengan tukang botot bahkan dari Rumah Tangga sendiri yang ada di lingkungan masyarakat serta sosialisasi-sosialisasi pemilahan dan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

6. Sampah tidak terkelola/terdata

Ada sekitar 15,80% (102.037,34 ton) sampah tidak terdata dan terkelola diantaranya sampah dari rumah tangga untuk eko enzim, composting, magot, botot, penduduk perbatasan dengan Deli Serdang dimana memungkinkan sampah berpindah ke Kabupaten yang berbatasan dan dibuang ke tempat di luar TPS/TPA (sungai dll) serta pelaksanaan pendataan sampah yang dikelola di tingkat Rumah Tangga. Sampah dari rumah tangga diperkirakan karena dibakar di buang ke tempat di luar TPS/TPA (sungai dll).

TABEL II.6
DATA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL (SIPSN)
TAHUN 2023 PERIODE II

No	KETERANGAN	NILAI	NILAI (Ton/hari)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	645.661,28	1.768,94
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)		
	<i>2,527,050 Jiwa x 0,7 kg x 365 hari</i>		
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	96.000,00	263,01
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	14,87	
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	486.493,00	1.332,86
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	75,35	

2.1.1. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tabel TC.29

Evaluasi capaian kinerja dilakukan mulai dari tingkat program sampai dengan tingkat kegiatan pada setiap program (kinerja kegiatan). Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan hasil penyempurnaan program/kegiatan sebagaimana yang terdapat dalam Renstra.

TABEL II.7 (TC. 29)
EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) OPD
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2023

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	100 %	100 %	70 %	70 %	100 %	80 %	83.33 %	83,33 %
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	17 Dokumen	4 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	83 %	2 Dokumen	11 Dokumen	64,71 %
PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/ KOTA	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	17 Dokumen	0	0	0	0%	3 Dokumen	3 Dokumen	17,65 %
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPPLH KABUPATEN/KOTA	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dokumen terkait lainnya yang tersedia	21 Dokumen	4 Dokumen	0	0	0%	0	4 Dokumen	19,05 %
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	18 Dokumen	0	6 Dokumen	5 Dokumen	83%	0	5 Dokumen	27,78 %
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	6 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	0	9 Dokumen	150 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai	9 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	4 Dokumen	12 Dokumen	133,33 %
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	6 Dokumen	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	2 Dokumen	3 Dokumen	50 %
PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang tersedia	6 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	0	1 Dokumen	16,67 %
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	31,61 Indeks	0	29,60 Nilai	28 Nilai	95%	30,27 Indeks	30,27 Indeks	95,76 %
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik	10 Hektar	0	2 Ha	2 Ha	100%	5 Hektar	7 Hektar	70 %
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Ha	0	3 Ha	3 Ha	100%	5 Hektar	8 Hektar	66,67 %
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	200 Orang	0	50 Orang	50 Orang	100%	100 Orang	150 Orang	75 %
PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Unit	0	4 Ha	0	0%	4 Unit	4 Unit	100 %
	Jumlah Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati yang dikelola dengan Baik	10 Ha	0	0	0	0%	0	0	0.00 %
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Volume Sampah yang ditangani	2,651,858,737 Ton	0	0	0	0%	468,250.36 Ton	468,250.36 Ton	0.02 %
	Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan	75 %	65 %	0	0	0%	0	65 %	86,67 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai	60 %	45 %	0	0	0%	65 %	65 %	108,33 %
SUPERVISI PEMBANGUNAN/REHABILITASI/PENINGKATAN TPA/ TPST/SPA/ TPS-3R/ TPS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Jumlah Dokumen Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang tersedia	13 Dokumen	9 Dokumen	0	0	0%	0	9 Dokumen	69,23 %
	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/SPST /SPA/TPS-3R/TPS	13 Dokumen	0	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	0	1 Dokumen	7,69 %
PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	36 Dokumen	0	0	0	0%	9 Dokumen	9 Dokumen	25 %
PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang dibangun	743 Ton/ Hari	0	0	0	0%	1,259 Ton/ Hari	1259 Ton/ Hari	169,45 %
	Jumlah SPA/TPS-3R/TPS yang terbangun	49 Unit	1 Unit	0	0	0%	0	1 Unit	2,04 %
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	300,000 Rumah Tangga	0	87,594 Rumah Tangga	83530 Rumah Tangga	95%	0	83530 Rumah Tangga	27,84 %
OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	3 Unit	0	0	0	0%	1 Unit	1 Unit	33,33 %
PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	3992 Ton/ Hari	0	0	0	0%	1,259 Ton/Hari	1259 Ton/Hari	31,54 %
	Jumlah SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan fasilitas, sarana dan prasarannya	6 Unit	2 Unit	0	0	0%	0	2 Unit	33,33 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
REHABILITASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0	11 Unit	110 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	74 %	45 %	0	0	0%	65 %	65 %	87,84 %
	Persentase Kebijakan/Regulasi/Strategi Pengelolaan Persampahan yang Tersedia	74 %	45 %	0	0	0%	65 %	65 %	87,84 %
Pengelolaan Sampah	Timbulan sampah yang terkelola	70 %	45 %	0	0	0%	45 %	45 %	64,29 %
	Jumlah Kebijakan yang disusun dalam mendukung pelaksanaan kerjasama Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	0	1 Dokumen	20 %
PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah yang tersedia	5 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	0	1 Dokumen	20 %
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	258 Kelompok	0	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	85 Kelompok	88 Kelompok	34,11 %
	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	195 Kali	12 Kali	0	0	0%	0	12 Kali	6,15 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	6 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	33,33 %
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan yang tersedia	52291 Unit	2543 Unit	0	0	0%	0	2543 Unit	4,86 %
PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/ PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	3,544,830 Ton	0	0	0	0%	547,000 Ton	547000 Ton	15,43 %
PENANGANAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMILAHAN, PENGUMPULAN, PENGANGKUTAN, PENGOLAHAN, DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	Volume Sampah yang terangkut dan diproses di TPA	4025000 Ton	335,811.84 Ton	0	0	0%	0	335811.84 Ton	8,34 %
	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	675,000 Ton	0	660,000 Ton	543,952 Ton	82%	0	543952 Ton	80,59 %
PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	3 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	1 Laporan	33,33 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENGURANGAN SAMPAH DENGAN MELAKUKAN PEMBATAAN, PENDAURAN ULANG DAN PEMANFAATAN KEMBALI	Jumlah Fasilitas Pengurangan Sampah yang terbangun/tersedia	33 Unit	3 Unit	0	0	0%	0	3 Unit	9,09 %
	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	5 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	1 Laporan	20 %
PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang tersedia	434 Unit	1 Unit	0	0	0%	0	1 Unit	0,23 %
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100 %	0	0	0	0%	80 %	80 %	80 %
	Tingkat Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	100 %	60 %	70 %	70 %	100%	0	70 %	70 %
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3	100 %	0	0	0	0%	50 %	50 %	50 %
	Cakupan Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	75 %	20 %	30 %	30 %	100%	0	50 %	66,67 %
FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	25 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	8 %
	Jumlah Laporan Rincian Teknik penyimpanan dan Pengumpulan Skala LB3 di Kota Medan	80 Laporan	21 Laporan	0	0	0%	0	21 Laporan	26,25 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	Jumlah pengujian karakteristik Sludge yang mengandung LB3	250 Sampel	10 Sampel	0	0	0%	0	10 Sampel	4 %
	Jumlah Laporan kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Perse-tujuan/Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	13 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	1 Laporan	7,69 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan da-lam perizinan berusaha/ persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	100 %	100 %	70 %	70 %	100%	80 %	73,33 %	73,33 %
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota	Persentase ketaatan terhadap ketentu-an yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah ter-kait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	100 %	100 %	70 %	70 %	100%	80 %	73,33 %	73,33 %
FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	732 Dokumen	0	130 Dokumen	143 Dokumen	110%	100 Dokumen	243 Dokumen	33,20 %
	Jumlah Verifikasi Persetujuan Teknis SLO (Surat Kelayakan Operasional)	500 SLO	41 SLO	0	0	0%	0	41 SLO	8,20 %
	Jumlah Persetujuan Lingkungan Hidup yang diterbitkan	1262 Dokumen	132 Dokumen	0	0	0%	0	132 Dokumen	10,46 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	600 Badan Usaha	0	0	0	0%	200 Badan Usaha	200Badan Usaha	33,33 %
PENGAWASAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LH, IZIN PPLH YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Usaha/ Kegiatan yang diawasi oleh Pemerintahan Kota	1,200 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	0	0	0%	0	200 Pelaku Usaha	16,67 %
	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1,200 Laporan	0	200 Laporan	224 Laporan	112%	0	224 Laporan	18,67 %
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI UPAYA DAN RENCANA PPLH	Jumlah Sanksi yang diterbitkan dalam Rangka Pengawasan dan Penerapan Upaya dan Rencana PPLH	125 Sanksi	18 Sanksi	0	0	0%	0	18 Sanksi	14,40 %
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	125 Dokumen	0	50 Dokumen	45 Dokumen	90%	0	45 Dokumen	36 %
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100 %	100 %	100 %	99 %	99%	100 %	99,67 %	99,67 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	0	0	0	0%	100 %	1 %	1 %
	Cakupan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 %	100 %	100 %	99 %	99%	0	99,5 %	99,50 %
PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	246 Pengaduan	0	0	0	0%	50 Pengaduan	50 Pengaduan	20,33 %
	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup yang ditangani	300 Pengaduan	25 Pengaduan	0	0	0%	0	25 Pengaduan	8,33 %
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PPLH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	300 Dokumen	0	50 Dokumen	48 Dokumen	96%	0	48 Dokumen	16 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	100 %	0	0	0	0%	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	25,4 %	25 %	25,10 %	25,10 %	100%	0	25,07 %	98,70 %
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia	29 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	8 Dokumen	12 Dokumen	41,38 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	39 Dokumen	0	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	8 Dokumen	17 Dokumen	43,59 %
	Jumlah Dokumen laporan pemantauan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan TPA yang tersedia	32 Laporan	6 Laporan	0	0	0%	0	6 Laporan	18,75 %
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	18 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	7 Dokumen	38,89 %
	Jumlah laporan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia	5 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	0	1 Laporan	20 %
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi yang tersedia	5 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	0	1 Laporan	20 %
	Jumlah laporan kegiatan kampung iklim sebagai bagian dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terlaksana	5 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	0	1 Laporan	20 %
PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	14 Dokumen	0	0	0	0%	2 Dokumen	2 Dokumen	14,29 %
	Jumlah prasarana dan sarana laboratorium lingkungan hidup yang tersedia dan terkelola dengan baik dan memadai	8 Unit	2 Unit	0	0	0%	0	2 Unit	25 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	8 Dokumen	0	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	0	4 Dokumen	50 %
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota	persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi	100 %	0	0	0	100%	80 %	80,6 %	80,60 %
	Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang ditanggulangi	75 %	100 %	30 %	30 %	100%	0	65,15 %	86,87 %
PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	36 Laporan	0	3 Laporan	3 Laporan	100%	2 Laporan	5 Laporan	13,89 %
	Jumlah pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat yang dilaksanakan	16 Kegiatan	3 Kegiatan	0	0	0%	0	3 Kegiatan	18,75 %
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	persentase pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan	75 %	0	0	0	100%	40 %	40,6 %	54,13 %
	Cakupan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang dipulihkan	75 %	100 %	40 %	40 %	100%	0	70 %	93,33 %
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	141 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	20 Dokumen	21 Dokumen	14,89 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah pencemaran yang berhasil dihentikan dari sumbernya	755 Kasus	132	0	0	0%	0	132,3 Kasus	17,52 %
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100 %	90 %	90 %	100%	95 %	91,67 %	91,67 %
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana	6 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	50 %
PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	20 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	6 Dokumen	30 %
	Jumlah gerakan peduli lingkungan hidup yang difasilitasi	26 Kali	3 Kali	0	0	0%	0	3 Kali	11,54 %
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	9005 Orang	0	2,250 Orang	2,250 Orang	100%	1500 Orang	3750 Orang	41,64 %
	Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terselenggara	15 Kali	5 Kali	0	0	0%	0	5 Kali	33,33 %
PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN	Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi yang terdaftar yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	15 Lembaga	0	5 Lembaga	5 Lembaga	100%	0	5 Lembaga	33,33 %
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan hidup	100 %	0	0	0	0%	80 %	80 %	80 %
	Capaian Penyelenggaraan Penghargaan Lingkungan Hidup	100 %	100 %	70 %	70 %	100%	0	85 %	85 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	21 Kegiatan	3	4	4	100%	3 Kegiatan	10 Kegiatan	47,62 %
PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/ LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/ DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1960 Entitas	0	400 Entitas	400 Entitas	100%	750 Entitas	1150 Entitas	58,67 %
	Jumlah penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terselenggara	1300 Lembaga	260 Lembaga	0	0	0%	0	260 Lembaga	20 %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu	100 %	0	0 %	0 %	0%	100 %	100 %	100 %
	Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	100 %	100 %
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	0	0 %	0 %	0%	100 %	100 %	100 %
	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	0	4 Dokumen	33,33 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	50%	4 Dokumen	6 Dokumen	50 %
	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	100 %	0	0	0	0%	100 %	1 %	1 %
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	6 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	0	1 Dokumen	16,67 %
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	1 Dokumen	16,67 %
VALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0	1 Laporan	16,67 %
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %	0	0 %	0 %	0%	100 %	100 %	100 %
	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	100 %	100 %
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	135 Orang/ Bulan	0	138 Orang/ Bulan	124 Orang/Bulan	90%	135 Orang/Bulan	135 Orang/Bulan	100 %
	Jumlah Pegawai ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	421 Orang	71 Orang	0	0	0%	0	71 Orang	16,86 %
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersedia	6 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0%	0	1 Dokumen	16,67 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Laporan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	0	1 Laporan	16,67 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	Jumlah ASN dan pegawai lainnya di perangkat daerah yang diberikan pakaian khusus hari - hari tertentu	790 Stel	144 Stel	0	0	0%	0	144 Stel	18,23 %
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	0	0	0	0%	2 Paket	2 Paket	22,22 %
	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	929 Stel	164 Stel	0	0	0%	0	164 Stel	17,65 %
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	135 Orang	0	0	0	0%	0	0 Orang	0,00 %
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implemenasi Peraturan Perundang-Undangan	135 Orang	10 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	50 Orang	37,04 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	0	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	2 Paket	50 %
	Jumlah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 %	100 %	0	0	0%	0	100 %	100 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	25 %
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	685 Unit	100 Unit	0	0	0%	0	100 Unit	14,60 %
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	2 Paket	2 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	25 %
	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	100 %	100 %	0	0	0%	0	100 %	100 %
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	0	5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	10 Paket	50 %
	Jumlah Tersedianya alat tulis kantor	100 %	100 %	0	0	0%	0	100 %	1.00 %
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket	0	5 Paket	5 Paket	100%	2 Paket	7 Paket	35 %
	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	100 %	0	0	0%	0	100 %	100 %
PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	3 Kegiatan	6 Paket	6 Paket	100%	4 Paket	13 Paket	54,17 %
	Jumlah jasa penyelenggaraan peringatan hari raya/hari besar/acara tertentu	23 Kegiatan	3 Kegiatan	0	0	0%	0	3 Kegiatan	13,04 %
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	190 Laporan	0	40 Laporan	40 Laporan	100%	45 Laporan	85 Laporan	44,47 %
	Jumlah tamu yang difasilitasi	130 Orang	300 Orang	0	0	0%	0	300 Orang	230,77 %
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	0	150 Laporan	150 Laporan	100%	150 Laporan	300 Laporan	50 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Perjalanan Dinas dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konultasi yang tersedia	500 Kali	20 Kali	0	0	0%	0	20 Kali	4 %
	Jumlah Rapat Korrdinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	335 Kali	100 Kali	0	0	0%	0	100 Kali	29,85 %
	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah yang diikuti	360 Kali	64 Kali	0	0	0%	0	64 Kali	17,78 %
PENATAUSAAHAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip dinamis yang tersedia	5 Laporan	1 Laporan	0	0	0%	0	1 Laporan	20 %
DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerint-tahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50 %
	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang dikelola dengan baik	24 Aplikasi	4 Aplikasi	0	0	0%	0	4 Aplikasi	16,67 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU	100 %	0	0	0	0%	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	7 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	0	2 Kegiatan	28,57 %
PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	656 Unit	0	0	0	0%	97 Unit	97 Unit	14,79 %
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	250 Unit	196 Unit	0	0	0%	0	196 Unit	78,40 %
PENGADAAN ALAT BESAR	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	0	0	0	0%	0	0 Unit	0.00 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Jumlah Alat Besar/ Alat Kendaraan Berat yang tersedia	10 Unit	2 Unit	0	0	0%	0	2 Unit	20 %
PENGADAAN MEBEL	Jumlah Mebel Kantor yang Tersedia	70 Unit	2 Unit	0	0	0%	0	2 Unit	2,86 %
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	103 Unit	0	13 Unit	4Unit	31%	56 Unit	60 Unit	58,25 %
	jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibeli	200 Unit/Jenis	100 %	0	0	0%	0	100 Unit/Jenis	50 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0	0 %	0 %	0%	100 %	100 %	100 %
	Persentase cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	0 %	100 %	100 %
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	50 %
	Jumlah surat menyurat yang terkirim melalui jasa pengiriman	10800 Surat	1,010 Surat	0	0	0%	0	1010 Surat	9,35 %
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	4 Laporan	33,33 %
	Jumlah tagihan rekening jasa komunikasi, air minum dan listrik yang terbayar	30 Rekening	5 Rekening	0	0	0%	0	5 Rekening	16,67 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	52 Laporan	0	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	26 Laporan	50 %
	Jumlah tenaga jasa pelayanan umum yang tersedia	60 Orang	10 Orang	0	0	0%	0	10 Orang	16,67 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan	100 %	0	0	0	0%	100 %	100 %	100 %
	Jumlah Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara	7 Kegiatan	1Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	0	2 Kegiatan	28,57 %
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	0	1 Unit	0	0%	6 Unit	6 Unit	25 %
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	28 Unit	5 Unit	0	0	0%	0	5 Unit	17,86 %
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	345 Unit	0	51 Unit	51 Unit	100%	76 Unit	127 Unit	36,81 %
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	2889 Kegiatan	3 Kegiatan	0	0	0%	0	3 Kegiatan	0,10 %
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	637 Unit	100 Unit	120 Unit	120 Unit	100%	71 Unit	291 Unit	45,68 %

Urusan/ Bidang urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (Th. 2023) (n- 2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Kegiatan	
				Target Renja tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d thn berjalan 2024 n-1 (TW II)	Tingkat cap Realisasi Target
2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	8 Unit	50 %
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	115 Unit	0	5 Unit	5 Unit	100%	77 Unit	82 Unit	71,30 %
	Jenis dan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100 Unit/ Jenis	100 Unit/ Jenis	0	0	0%	0	100 Unit/Jenis	100 %
Penataan Organisasi	Persentase Cakupan Penataan Organisasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200 Dokumen	0	40 Dokumen	40 Dokumen	100%	40 Dokumen	80 Dokumen	40 %
	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Kali	40 Kali	0	0	0%	0	40 Kali	80 %

2.1.2. Evaluasi Capaian Renstra OPD

Evaluasi Capaian Renstra OPD dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap capaian sasaran Renstra pada tahun 2023 terhadap target yang direncanakan yang secara singkat dapat dijelaskan bahwa evaluasi capaian kinerja terhadap sasaran dilakukan dengan melakukan analisis terhadap masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing – masing sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah/Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah.

TABEL II.8 (TC.30)
Pencapaian Kinerja dan Realisasi Tujuan, Sasaran Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja awal RENSTRA	TARGET			REALISASI			TARGET			Kondisi Kinerja akhir RENSTRA
				2020	Thn 2021	Thn2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	
(1)	(2)	(3)	2020	Thn 2021	Thn2022	Thn 2023	Thn 2021	Thn2022	Thn 2023	Thn 2024	Thn 2025	Thn 2026	
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	57,6	61	60,02	61,89	62,39	61,89	63,67	63,68	63,7	63, 71	63,71%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Tersedia	24,8%	24,9%	8%	14,45	-	14,34%	15,98	17,16%	17,98%	18,52%	18,52%
2.	Meningkatnya Penanganan Sampah	Persentase Penanganan sampah	72	72,88	72,81%	73	89,71%	49,34%	71,19	71%	70%	70%	70%
		Persentase Peningkatan Jumlah WRS dari tahun sebelumnya	-	-	-	15	-	-	16,33	17,5%	18%	18%	18%
3.	Meningkatnya Pengurangan Sampah	Persentase Pengurangan sampah	10	10,14%	9,62%	27	3,04%	5,16%	13,01	28%	30%	30%	30%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah								BB	BB	A	A

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008.

Berdasarkan Tabel II.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan paling tinggi adalah pada Program Pengelolaan Persampahan dan terendah pada Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lihat Tabel II.9

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD dengan mengacu kepada prioritas program/kegiatan dan hasil pembahasan awal renja berdasarkan rancangan RKPD Pemerintah Kota Medan Tahun 2025.

TABEL II.9
CAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN TARGET DALAM DOKUMEN TAHUN 2023

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
Tujuan 1 :	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7.353.631.161	5.941.707.265	8,10%
Sasaran 1 :	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	7.353.631.161	5.941.707.265	58,50%
		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tersedia			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselenggara secara efektif	986.461.160	577.110.000	58,50%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	345.848.560	227.674.941	65,83%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH	107.109.175	3.600.000	3,36%
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	607.890	600.000	98,70%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup	3.388.584.521	3.104.332.134	91,61%

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	ANGGARAN		
			PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	214.457.360	204.564.160	95,39%
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	1.892.867.635	1.484.223.680	78,41%
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase penyelenggaraan penghargaan lingkungan hidup	417.694.860	339.602.350	81,30%
Tujuan 2 :	Peningkatan sampah terkelola di Kota Medan	Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	101.969.473.876	89.097.903.077	87,38%
Sasaran 1 :	Meningkatnya penanganan sampah	Persentase penanganan sampah	3.975.166.984	2.757.163.966	69,36%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Volume sampah yang ditangani	3.975.166.984	2.757.163.966	69,36%
Sasaran 2 :	Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase pengurangan sampah	97.994.306.892	86.340.739.111	88,11%
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase Volume Sampah yang Terkelola	12.089.251.004	12.030.766.990	99,52%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase dukungan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang tersedia	85.905.055.888	74.309.972.121	86,50%
TOTAL			109.323.105.037	95.039.610.342	86,93%

TABEL II.10.
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2024
Kota Medan Dinas Lingkungan Hidup

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN	Ranwal Renja 2024	Renja 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
		Rp	Rp		
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	956.006.200	956.006.200	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	363.526.200	363.526.200	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	592.480.000	592.480.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.210.153.560	650.480.000	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.210.153.560	650.480.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	654.846.440	179.752.380	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	654.846.440	179.752.380	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	183.550.340	100.790.340	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	183.550.340	100.790.340	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.654.311.340	3.689.119.525	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.544.886.340	3.581.644.525	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	108.225.000	106.275.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.200.000	1.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode Rekening	PROGRAM/KEGIATAN	Ranwal Renja 2024	Renja 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Keterangan
		Rp	Rp		
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	694.932.780	694.932.780	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	694.932.780	694.932.780	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.190.680	199.190.680	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.190.680	199.190.680	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	51.519.725	51.519.725	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	51.519.725	51.519.725	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.066.341.540	10.549.969.880	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	11.066.341.540	10.549.969.880	Dinas Lingkungan Hidup	
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.563.990.000	3.099.990.000	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.563.990.000	3.099.990.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.914.208.070	50.415.928.882	Dinas Lingkungan Hidup	Efisiensi
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.800.000	55.800.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.869.904.249	19.869.904.249	Dinas Lingkungan Hidup	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.601.580.160	3.011.056.600	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.776.453.353	8.805.770.000	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.159.000	0	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.541.445.261	17.737.437.647	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.063.948.336	855.960.386	Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.13	Penataan Organisasi	80.000.000	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
	Total	105.785.132.964	70.587.680.392		

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah Indek Kualitas Lingkungan Hidup, pencemaran air, udara, sampah dan limbah B3, terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, kerusakan kualitas air sungai serta peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim (emisi gas rumah kaca).

Untuk penanganan isu tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan melakukan kegiatan strategis meliputi:

1. Informasi Status Mutu Udara Ambien;
2. Informasi Status Mutu Udara Ambien;
3. Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan; pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Pos Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
5. Penaatan Lingkungan Perusahaan;
6. Rekomendasi Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL-AMDAL/UKL-UPL) dan Izin Lingkungan;
1. Pengelolaan Limbah B3 (Rekomendasi Izin Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan Limbah B3);
2. Pengelolaan Sampah;
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten/Kota;
4. Penyediaan informasi tentang daya dukung dan daya tampung lingkungan, resiko lingkungan, jasa lingkungan (jasa ekosistem, PDRB Hijau), kerentanan keanekaragaman hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
5. Penyediaan dokumen RPPLH, baku mutu lingkungan, kriteria baku kerusakan;
6. Penyediaan Jasa Teknis (Pelatihan/Pembinaan, Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup Kepada Kabupaten/Kota);
7. Penyediaan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Nirwasinta Tantra);
8. Penyediaan Data dan Informasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

9. Pengelolaan Limbah Cair Domestik;
10. Pemantauan Kualitas Lingkungan di (Tempat Pembuangan Akhir) TPA;
11. Penaatan Lingkungan Perusahaan.

2.5. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Pencapaian kinerja pada aspek pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dalam upaya pengelolaan Lingkungan Hidup untuk pelayanan informasi dan informasi pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dapat dilihat pada TABEL II.1. Berdasarkan TABEL II.1 tersebut, dapat dilihat bahwa sudah tercapai semua kinerja pelayanan yang di tetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Namun tingkat presentase target Volume Kinerja Pelayanan masih belum mencapai optimal sesuai dengan target yang diinginkan.

Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan pencapaian belum optimalnya persentase target pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, untuk mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja kurang optimal;
3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang masih belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan;
4. Mekanisme kerja dan koordinasi inter dan intra Bidang dan Sekretariat masih kurang sinergi.

Untuk Tahun 2024 Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang akan di rencanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu 11 Program, 21 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Adapun Program yang prioritas berjumlah 10 program dan 1 program penunjang.

A. Perencanaan Pembangunan Kota Medan

Kota Medan telah memiliki berbagai produk perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tantangan pokok dalam ketersediaan rencana pembangunan kota ini adalah tingkat sinkronisasi dan keterpaduannya secara hirarkis, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan kota, yang relatif masih lemah sehingga secara implementatif belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Berbagai permasalahan pokok dalam penyelenggaraan produk-produk perencanaan pembangunan kota antara lain adalah :

- Masih terbatasnya sumber daya pembangunan yang dapat dikelola dalam pembangunan kota;
- Masih relative rendahnya koordinasi, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas rencana pembangunan kota;
- Relatif masih terbatasnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pembinaan, fasilitasi penyusunan rencana pembangunan kota;
- Terbatasnya dukungan kerangka studi, instrument analisis dan studi lapangan yang dilakukan sebelum menyusun rencana pembangunan kota. Masih terbatasnya wadah dan sarana partisipasi publik dalam proses perencanaan pembangunan kota;
- Masih terbatasnya kegiatan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut evaluasi rencana pembangunan kota. Implementasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang relatif belum sepenuhnya optimal;
- Masih terbatasnya pendidikan dan latihan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Perencana.

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan diharapkan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

12. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/pelaku usaha untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;

13. Kajian/studi-studi di bidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kota Medan dan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
14. koordinasi dan dinamika perubahan. Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
15. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap Visi dan Misi;
16. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur;
17. Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan mutu kualitas lingkungan.

Untuk Sumber Daya Manusia Aparatur dapat melakukan yaitu:

- a. Mengikuti pendidikan fungsional, kursus dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
- b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan TUPOKSI dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
- c. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan TUPOKSI dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana dapat melakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Teknologi Informatika serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
2. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
3. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap serta optimasi pemeliharaan;
4. Optimasi dan penambahan ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

2.6. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2024

Rancangan awal Renja tahun 2024 untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan merencanakan alokasi anggaran belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja tidak langsung dianggarkan untuk pembayaran gaji PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan sedangkan untuk Belanja langsung dilaksanakan untuk pelayanan dan pembangunan bidang Lingkungan Hidup. Untuk belanja langsung telah direncanakan 11 program dengan 21 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 105.785.132.964. Tabel II.10 adalah Tabel Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2024 Kota Medan Dinas Lingkungan Hidup.

2.7. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi perguruan tinggi ataupun dari Perangkat Daerah maupun dari hasil penelitian di lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan dan kota. Ada 14 usulan Musrenbang Kecamatan.

2.8. Data Terpilah Pengarusutamaan Gender Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan pada tahun 2023 melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan yang melibatkan pengarusutamaan gender pria dan wanita. Adapun program dan sub kegiatan dapat dilihat pada TABEL II.12

TABEL II.11
USULAN MUSRENBANG KECAMATAN KOTA MEDAN TAHUN 2024

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
1	Kelurahan Kesawan – Kecamatan Medan Barat	Rabu, 10 Januari 2024 14:22:36 WIB	Mengurangi Pencemaran Limbah Plastik	Pelatihan Atau Pendampingan Keterampilan Pengelolaan Sampah Atau Daur Ulang Sampah	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Kelurahan Kesawan	Jl Putri Hijau No 46	Kelurahan Kesawan	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 1 Kegiatan	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	• Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Masyarakat, Kelompok Atau Para Pihak Yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan.
	• Harga Satuan : Rp 30.000.000			• Rekomendasi : Direkomendasikan										
	Kelurahan Waspada Narkoba Kelurahan Rawan Tuberkulosis			Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Anggaran : Rp 30.000.000,00		• Volume : 1 Kegiatan
												• Anggaran : Rp 30.000.000,00		• Status Usulan : Diterima
2	Kelurahan Kotamatsum – III - Kecamatan Medan Kota	Senin, 15 Januari 2024 15:00:48 WIB	Kurangnya Keterampilan Dalam Pengelolaan Sampah	Pelatihan Atau Pendampingan Keterampilan Pengelolaan Sampah	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Ibu-Ibu Rumah Tangga	Jl. Ramlan Yatim No.1	Jl. Ramlan Yatim No. 1, Aula Kantor Lurah Kota Matsum III	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 1 Kegiatan	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	• Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Masyarakat, Kelompok Para

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
				Atau Daur Ulang Sampah										Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif Dalam Kegiatan
	Kelurahan Waspada Narkoba kelurahan Rawan Tuberkulosis											• Harga Satuan : Rp 30.000.000		• Rekomendasi : Agar Menjadi Prioritas
				Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Anggaran : Rp 30.000.000		• Volume : 1 Kegiatan
														• Harga Satuan : Rp.30.000.000,00
														• Anggaran : Rp 30.000.000,00
														• Status Usulan : Diterima
3	Kecamatan Medan Amplas	Senin, 29 Januari 2024 09:52:44 WIB	Untuk Mengurangi Sampah Di Wilayah Kecamatan Medan Amplas	Pelatihan Atau Pendampingan Keterampilan Pengelolaan Sampah Atau Daur Ulang Sampah	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Pegawai Dan Masyarakat	Jl. Garu III No. 111 Kel. Harjosari I	Kantor Camat Medan Amplas Jl. Garu III No. 111 Kel. Harjosari I	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 2 Kegiatan	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-
				Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Harga Satuan : Rp 30.000.000		
												• Anggaran : Rp 60.000.000		
4	Kecamatan Medan Kota	Senin, 29 Januari 2024 16:19:49	Agar Menambah Ketrampilan Dan	Pelatihan Atau Pendampingan Keterampilan Dan	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat	Jl. Stadion No. 03 Medan	Aula Kantor Kecamatan Medan	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 30 Kegiatan	Usulan Belum Diverifikasi OPD	-
												• Harga		

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
		WIB	Jiwa Berusaha Masyarakat Se-Kecamatan Medan Kota	pilan Pengelolaan Sampah Atau Daur Ulang Sampah			kat Se-Kecamatan Medan Kota		Kota			Satuan : Rp 30.000.000	Terkait	
				Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Anggaran : Rp 900.000.000		
5	Kelurahan Petisah Hulu - Kecamatan Medan Baru	Rabu, 17 Januari 2024 19:26:40 WIB	Kurangnya Tempat Sampah Dilingkungan Sehingga Membuat Lingkungan Kotor	Pengadaan Tong Sampah Komunal	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Warga / Masyarakat	Jl. Darat Ling.2, Jl.Jl S.Parman 4, Jl Mojopahit Ling.6,Jl. S.Parman Lr Bulan Lr Family Ling.7, Jl.Bawang Ling.8, Jl. S.Parman Gg Langgar Ling.9, Jl.Kacang Lingk.10,Jl .Sriwijaya Ling.11,Jl. S.Parman Gg Saoh Ling.12	Jl.Darat Ling.2, Jl.Jl S.Parman 4, Jl Mojopahit Ling.6,Jl.S. Parman Lr Bulan Lr Family Ling.7, Jl.Bawang Ling.8,Jl.S. Parman Gg Langgar Ling.9,Jl.K acang Lingk.10,Jl .Sriwijaya Ling.11,Jl. S.Parman Gg Saoh Ling.12	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 30 Unit	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	• Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi
	Kelurahan Waspada Narkoba kelurahan Rawan Tuberkulosis			• Harga Satuan : Rp 1.300.000				• Rekomendasi : Diprioritaskan						
				Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Anggaran : Rp 39.000.000		• Volume : 30 Unit
												• Harga Satuan : Rp 1.300.000,00		• Harga Satuan : Rp 1.300.000,00
												• Anggaran : Rp 39.000.000,00		• Anggaran : Rp 39.000.000,00
												• Status Usulan : Diterima		• Status Usulan : Diterima
6	Kelurahan Jati - Kecamatan Medan Maimun	Senin, 8 Januari 2024 11:24:55 WIB	Sampah Tidak Tertampung Dikarenakan Tempat Tak	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Warga Masyarakat Diling-	Jl. Samanhudi LK. IV, Jl. Slamet Riyadi Jl. Taman	Belakang Mesjid Nurul Muslim, Rs Elisabeth, Komp.	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 10 Unit	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	• Rekomendasi : Direkomendasikan
												• Harga Satuan : Rp.1.700.000		

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
	Kelurahan Waspada Narkoba Kelurahan Rawan Tuberkulosis		Memadai	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan			kungan II , Lingkungan IV Dan Lingkungan V	Polonia I	Taman Polonia			• Anggaran : Rp 17.000.000		• Volume : 10 Unit
	Lokus Stunting			Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan					• Harga Satuan : Rp 1.700.000,00			• Status Usulan : Diterima		
	Lokus Kumuh								• Anggaran : Rp 17.000.000,00			• Rekomendasi : Direkomendasikan		
	Kelurahan Waspada Narkoba kelurahan Rawan Tuberkulosis								• Harga Satuan : Rp 1.700.000,00			• Status Usulan : Diterima		
											• Anggaran : Rp 170.000.000		• Volume : 100 Unit	
												• Harga Satuan : Rp 1.700.000,00		• Status Usulan : Diterima
												• Anggaran : Rp 170.000.000		• Rekomendasi Prioritas : Prioritas Utama
7	Kecamatan Medan Perjuangan	Minggu, 21 Januari 2024 22:47:56 WIB	Masih Kurangnya Tong Sampah Terpilah	Pengadaan Tong Sampah Terpilah	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Warga	Kantor Camat Medan Perjuangan	Kelurahan Se-Kecamatan Medan Perjuangan	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 50 Unit • Harga Satuan : Rp 1.700.000	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
				Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Anggaran : Rp 85.000.000		
8	Kecamatan Medan Area	Rabu, 31 Januari 2024 14:39:36 WIB	Kurangnya Tempat Pembuangan Sampah Disekitaran Jalan Rahmadsyah	Pengadaan Tong Sampah Terpilah Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Warga Se-Kecamatan Medan Area	Jl. Rahmadsyah No. 2 Medan	Area Kecamatan Medan Area	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 10 Unit • Harga Satuan : Rp 1.700.000 • Anggaran : Rp 17.000.000	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-
9	Kecamatan Medan Petisah	Senin, 22 Januari 2024 21:54:19 WIB	Tidak Adanya Tempat Penampungan Sementara Di Wilayah Kecamatan Medan Petisah	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Dan Kebersihan Lingkungan Di Wilayah Kecamatan Medan Petisah	Jl. Gatot Subroto Lk. XI Kelurahan Sekip	Jl. Gatot Subroto, Lk. XI, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 1 Unit • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000.000	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-
10	Kecamatan Medan Maimun	Kamis, 25 Januari 2024 09:04:28 WIB	Tidak Adanya Tempat Sampah Permanen Di Wilayah Kecamatan Medan Maimun, Sehingga Masih Menumpang Di Tanah Kosong Warga	Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat	Kecamatan Medan Maimun	Wilayah Kecamatan Medan Maimun	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 1 Unit • Harga Satuan : Rp 1.000.000.000 • Anggaran : Rp 1.000.000.000	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
11	Kelurahan Durian - Kecamatan Medan Timur	Selasa, 16 Januari 2024 10:57:42 WIB	Becak Sampah – Penambahan Armada Becak Sampah Untuk Kelurahan Durian Dimana Kurangnya Becak Dalam Menyisiran Sampah Disetiap Lingkungan Terutama Jalan Protokol Untuk Malam Hari	Penyediaan Becak Sampah	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Warga Kelurahan Durian	Jl Bambu II No 10	Setiap Lingkungan Kelurahan Durian	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 2 Unit	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	• Indikator Sub Kegiatan OPD : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan
	• Harga Satuan : Rp 35.500.000			• Rekomendasi : Kuota Sudah Terpenuhi										
	Kelurahan Waspada Narkoba kelurahan Rawan Tuberkulosis			Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan								• Anggaran : Rp 71.000.000		• Volume : 2 Unit
												• Anggaran : Rp 71.000.000,00		• Harga Satuan : Rp.35.500.000,00
														• Status Usulan : Diterima
														• Rekomendasi Prioritas : - (Khusus Usulan Dibawah Bidang Fisik)
12	Kecamatan Medan Baru	Sabtu, 20 Januari 2024	Perlunya Diadakan Pengadaan	Penyediaan Becak Sampah	Bidang Infrastruktur Dan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya :	Kantor Camat Medan	Kantor Camat Medan	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	• Volume : 10 Unit	Usulan Belum Diveri-	-

#	Pengusul	Tanggal Usul	Permasalahan	Usulan	Bidang	Jenis Musrenbang	Kelompok Sasaran	Alamat	Detail Lokasi	Status Dana Kelurahan	OPD Tujuan	Detail Anggaran	Status Usulan	Rekomendasi Mitra Bappeda
		15:15:08 WIB	Armada Becak Baru Untuk Menganti Armada Becak Sampah Yang Sudah Rusak Sehingga Pelayanan Kebersihan Dapat Terlaksana Dengan Baik	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Kewilayahan		Warga Kecamatan Medan Baru	Baru	Baru, Jl. Rebab No. 34 Kelurahan Titi Rantai-Medan			<ul style="list-style-type: none"> • Harga Satuan : Rp 35.500.000 • Anggaran : Rp 355.000.000 	fikasi OPD Terkait	
13	Kecamatan Medan Labuhan	Kamis, 18 Januari 2024 15:05:25 WIB	Banyaknya Sampah Yang Tak Tertampung Kontainer Yang Ada	Pengadaan Truk Dan Bak Arm Roll 6 M3 Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Masyarakat Se Kecamatan Medan Labuhan	Kelurahan Pekan Labuhan Dan Besar	Kelurahan Pekan Labuhan Dan Besar	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Volume : 2 Unit • Harga Satuan : Rp.0.000 • Anggaran : Rp 1.100.000.000 	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-
14	Kecamatan Medan Perjuangan	Senin, 22 Januari 2024 10:50:54 WIB	Armada Kebersihan Rusak	Pengadaan Truk Dan Bak Arm Roll 6 M3 Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Musrenbang	Kelompok Sasaran Lainnya : Warga	Kantor Camat Medan Perjuangan	Jl Pendidikan No 89 Medan	Tidak	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Volume : 1 Unit • Harga Satuan : Rp.550.000.000 • Anggaran : Rp 550.000.000 	Usulan Belum Diverifikasi OPD Terkait	-

Sumber : Hasil Musrenbang Kecamatan 2023

Tabel II.12
Data Gender Pada Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Tahun 2023

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Gender	
					Pria	Wanita
1.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan Lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Edukasi Potensi dari Pemanfaatan Sampah yang dihasilkan sekolah (120 org) b. Pembinaan Gerakan Peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) (110 org sbyk 3x) c. Sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan hidup di sekolah (PBLHS) (120 org)	54 37 51	66 73 69
2.	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup kepada pelaku usaha doorsmear, rumah makan, bengkel dan laundry (150 org sbyk 10 x)	975	1.125
3.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	Pengawasan Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Melakukan Pengawasan kepada usaha dan/atau kegiatan (sebanyak 180 kali 3 SPT@ 4 orang)	4	7
4.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	FGD LINGKUNGAN HIDUP 1	31	25
5.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	FGD LINGKUNGAN HIDUP 2	26	31
6.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengelolaan Sampah	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Pengguna Peralatan Laboratorium	19	15
7.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Sosialisasi manfaat bank sampah	43	57
8.				Pengelolaan sampah ke kecamatan dan kelurahan	50	70

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Gender	
					Pria	Wanita
9.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	sosialisasi program kampung iklim	79	121
10.				sosialisasi Energi Terbarukan	123	77
11.				Sosialisasi Keanekaragaman Hayati	32	43
12.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pemantauan Uji Udara Roadside	6	2
13.				Pemantauan Emisi Sumber Tidak Bergerak	5	2
14.				Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan	75	25
15.				Pemantauan Kualitas Air Sungai	5	1
16.				Pemantauan Kualitas Lingkungan TPA	7	1
17.				Verifikasi Lapangan dan Uji TCLP	4	2
18.				Pemantauan Kualitas Air Limbah	8	7
19.				Pemantauan Kualitas Air Bawah Tanah	8	7
20.				Pemantauan Kualitas Air Danau	8	7
21.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2	2
22.		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.6	97	103

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Disamping itu juga penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik hukum dan keamanan.

Untuk Kabupaten/Kota, yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional (seperti tersebut diatas) dan provinsi untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota. Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya ini tertuang dalam RPJMD propinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD propinsi (rancangan awal) dan penelahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/kota yang direncanakan.

Arah kebijakan untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim terdiri dari:

- (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

- (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
- (c) Pembangunan Rendah Karbon. Strategi untuk mewujudkan masing-masing arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Visi bersama pembangunan kota 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2026) dirumuskan

VISI: “Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju Dan Kondusif”

MISI

1. MEDAN BERKAH

Mewujudkan Kota Medan Sebagai Kota yang Berkah dengan Memegang Teguh Nilai – Nilai Keagamaan dan Menjadikan Medan sebagai Kota Layak Huni juga Berkualitas bagi seluruh Lapisan Masyarakat"

2. MEDAN MAJU

Memajukan masyarakat Kota Medan melalui Revitalisasi Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Modern, Terjangkau oleh semua.

3. MEDAN BERSIH

Menciptakan Keadilan Sosial melalui Reformasi Birokrasi yang bersih, Profesional, AkunTABEL dan Transparan berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan public yang prima, adil dan merata.

4. MEDAN MEMBANGUN

Membangun Sarana dan Prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi local masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan Kualitas SDM.

5. MEDAN KONDUSIF

Mewujudkan Kenyamanan dan Iklim Kondusif bagi segenap Masyarakat Kota Medan Melalui Peningkatan Supremasi Hukum Berbasis Partisipasi Masyarakat.

6. MEDAN INOVATIF

Mewujudkan Kota Medan sebagai Kota Ekonomi Kreatif dan Inovatif yang Berbasis pada Penguatan Human Capital, Teknologi Digital dan Sosial Budaya.

7. MEDAN BERIDENTITAS

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, Santun, Harmonis, Toleran dalam Kenajemukan dan Cinta Tanah Air.

a. Program dan Kegiatan

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Anggaran tahun berjalan tahun 2024 terbagi 2 yaitu anggaran sebelum perubahan dan anggaran setelah perubahan. Anggaran sebelum Perubahan sebesar Rp 105.785.132.964 Anggaran sesudah Perubahan Rp. 70.587.680.392

TABEL III.1

Visi, Misi, Isu Strategis, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi , Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif Misi : Medan Membangun						
Tujuan Perubahan RPJMD	Sasaran RPJMD	Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui Pengurangan emisi polutan, promosi penggunaan energi terbarukan, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlanjutan lingkungan	1. Belum optimalnya pencapaian Indeks kualitas lingkungan hidup di Kota Medan.	1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
1. Peningkatan kualitas infrastruktur	2. Penurunan luas kawasan kumuh	2. Belum optimalnya pengangkutan sampah di Kota Medan. 3. Belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota Medan. 4. Masih minimnya pengolahan sampah yang menerapkan system 3R (reduse, reuse, recycle)	2. Peningkatan sampah terkelola di Kota Medan	2. Persentase pengelolaan sampah di Kota Medan	2. Meningkatnya penanganan sampah 3. Meningkatnya pengurangan sampah	2. Persentase penanganan sampah 3. Pesentase pengurangan sampah di tingkat rumah tangga

TABEL III.2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

URAIAN	Pagu Indikatif (Rp.) 2024		P1
	Sebelum	Sesudah	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4.563.990.000	3.099.990.000	3.099.990.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	4.563.990.000	3.099.990.000	3.099.990.000
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	4.563.990.000	3.099.990.000	3.099.990.000
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	800.000.000	600.000.000	600.000.000
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	550.000.000	400.000.000	400.000.000
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.106.000.000	392.000.000	392.000.000
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2.107.990.000	1.707.990.000	1.707.990.000
	4.563.990.000	3.099.990.000	3.099.990.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	101.221.142.964	67.487.690.392	67.487.690.392
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	81.541.290.359	50.415.928.882	50.415.928.882
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	261.800.000	55.800.000	55.800.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	261.800.000	55.800.000	55.800.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.869.904.249	19.869.904.249	19.869.904.249
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.869.904.249	19.869.904.249	19.869.904.249
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	346.159.000	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	201.159.000	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	145.000.000	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.541.445.261	17.737.433.647	17.737.433.647
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.655.775	13.723.903	13.723.903
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.393.977	65.871.331	65.871.331
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	68.100.954	34.405.753	34.405.753

URAIAN	Pagu Indikatif (Rp.) 2024		P1
	Sebelum	Sesudah	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.627.035.715	16.401.228.115	16.401.228.115
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	409.511.840	260.061.545	260.061.545
Penyediaan Bahan/Material	62.445.000	62.445.000	62.445.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.000.000	57.000.000	57.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	919.302.000	596.698.000	596.698.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	246.000.000	246.000.000	246.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.601.580.160	3.011.056.600	3.011.056.600
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.246.000.000	2.214.000.000	2.214.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	355.580.160	797.056.600	797.056.600
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	.063.948.336	855.964.386	855.964.386
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.200.000	17.700.000	17.700.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.770.936	334.786.986	334.786.986
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	723.977.400	503.477.400	503.477.400
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.776.453.353	8.805.770.000	8.805.770.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.770.000	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.613.760.000	7.960.340.000	7.960.340.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	306.000.000	377.000.000	377.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	524.093.353	305.000.000	305.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	126.830.000	163.430.000	163.430.000
Penataan Organisasi	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	80.000.000	80.000.000	80.000.000
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	956.006.200	956.006.200	956.006.200
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	363.526.200	227.350.800	227.350.800
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	363.526.200	227.350.800	227.350.800
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	592.480.000	728.655.400	728.655.400
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	592.480.000	728.655.400	728.655.400
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	4.654.311.340	3.689.119.525	3.689.119.525

URAIAN	Pagu Indikatif (Rp.) 2024		P1
	Sebelum	Sesudah	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	4.544.886.340	3.581.644.525	3.581.644.525
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1.090.172.575	982.062.850	982.062.850
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	578.398.140	103.014.000	103.014.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	2.876.315.625	2.496.567.675	2.496.567.675
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	108.225.000	106.275.000	106.275.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	108.225.000	106.275.000	106.275.000
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	1.200.000	1.200.000	1.200.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.210.153.560	650.480.000	650.480.000
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.210.153.560	650.480.000	650.480.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.480.000	400.480.000	400.480.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	59.673.560	-	-
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	950.000.000	250.000.000	250.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	51.519.725	51.519.725	51.519.725
Penyimpanan sementara Limbah B3	51.519.725	51.519.725	51.519.725
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51.519.725	51.519.725	51.519.725
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	654.846.440	179.752.380	179.752.380
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	654.846.440	179.752.380	179.752.380
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	176.152.380	176.152.380	176.152.380
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait	478.694.060	3.600.000	3.600.000

URAIAN	Pagu Indikatif (Rp.) 2024		P1
	Sebelum	Sesudah	
Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	694.932.780	694.932.780	694.932.780
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	694.932.780	694.932.780	694.932.780
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	190.561.700	190.561.700	190.561.700
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	504.371.080	504.371.080	504.371.080
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	199.190.680	199.190.680	199.190.680
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	199.190.680	199.190.680	199.190.680
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	199.190.680	199.190.680	199.190.680
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	183.550.340	100.790.340	100.790.340
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	183.550.340	100.790.340	100.790.340
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	183.550.340	100.790.340	100.790.340
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	11.075.341.540	10.549.969.880	10.549.969.880
Pengelolaan Sampah	11.075.341.540	10.549.969.880	10.549.969.880
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	965.500.000	865.500.000	865.500.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	2.559.888.000	2.134.516.340	2.134.516.340
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	7.162.803.540	7.162.803.540	7.162.803.540
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	387.150.000	387.150.000	387.150.000
	105.785.132.964	70.587.680.392	70.587.680.392

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025****4.1 Program dan Kegiatan**

Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan disusun berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Adapun Program yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk Rencana Kerja Tahun 2025 sebanyak 11 program, dimana 1 (satu) program Administrasi (pendukung) dan 10 (sepuluh) program Prioritas. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG****I. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL****1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan
- b. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- c. Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- d. Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP****II. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA****Kegiatan :**

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan/Material
 - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Alat Besar
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Penataan Organisasi

- a. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

III. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

- a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
- c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran

V. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

VI. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3

- a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

VII. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VIII. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
- b. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

IX. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

X. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

- a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

XI. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Pengelolaan Sampah

- a. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- c. Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigister, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan
- d. Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah

TABEL IV.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						99.758.241.730		111.813.525.360
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,235,875,247		4.659.534.338
	1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						6,235,875,247		4.659.534.338
1	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	<i>Volume Sampah yang ditangani</i>	453320 Ton		65%	449867 Ton	6,235,875,247	453320 Ton	4.659.534.338
	1.03.04.2.01	PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rasio Ketersediaan infrastruktur sistem pengelolaan persampahan yang memadai</i>	0		1 Unit/orang	0	6,235,875,247	0	4.659.534.338
	1.03.04.2.01.02	PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>	9 Dokumen			8 Dokumen	713,200,000	9 Dokumen	826.875.000
	1.03.04.2.01.03	PEMBANGUNAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun</i>	250 Ton/ Hari		150000 Rumah tangga	4 Lokasi	800.000.000	250 Ton/ Hari	882.000.000
	1.03.04.2.01.04	OPTIMALISASI TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi</i>	1 unit		1 unit	100 %	2.665.387.600	1 unit	1.725.726.713
	1.03.04.2.01.05	PENINGKATAN TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan</i>	1466 Ton/ Hari		150000 Rumah tangga	4 Laporan	2,057,287,647	1466 Ton/ Hari	1.224.932.625
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						93.522.366.483		107.171.425.615
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						93.522.366.483		107.171.425.615
2	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang Disusun Tepat Waktu</i>	100%		100%	100%	74,264,786,153	100%	85.115.034.417
	2.11.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</i>	2 Dokumen		4 Dokumen	100%	62.050.000	100 %	289.406.250
	2.11.01.2.01.01	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	62.050.000	2 Dokumen	289.406.250
	2.11.01.2.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu</i>	100%		100%	100%	23.092.562.578	100%	21.874.288.235
	2.11.01.2.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	135 Orang/ bulan		135 Orang/ bulan	131 Orang/ bulan	23.092.562.578	135 Orang/ bulan	21.874.288.235
	2.11.01.2.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tersedia</i>	100%		70%	100%	811,890,000	100%	985.000.000
	2.11.01.2.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA								
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 paket		2 paket	100%	424,390,000	2 paket	420.000.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.11.01.2.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	135		135 orang	100%	242,500,000	135	420.000.000
	2.11.01.2.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	35 orang		20 orang	18	145.000.000	35 orang	145.000.000
	2.11.01.2.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	<i>Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tersedia</i>	100%		100%	100%	22,645,771,869	100%	24.037.222.954
	2.11.01.2.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR								
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	1 paket		1 paket	100%	25.987.960	1 paket	29.432.092
	2.11.01.2.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 paket		1 paket	100%	149,993,050	3 paket	83.312.265
	2.11.01.2.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA								
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 paket		1 paket	100%	52.888.125	3 paket	83.312.265
	2.11.01.2.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 paket		5 paket	100%	20,800,904,084	5 paket	21.999.953.426
	2.11.01.2.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	5 paket		2 paket	100%	303,279,750	5 paket	420.000.000
	2.11.01.2.06.07	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL								
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	6 paket		4 paket	100%	60.000.000	6 paket	68.845.613

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.11.01.2.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	50 laporan		45 laporan	50 Laporan	70,950,600	50 laporan	74.088.000
	2.11.01.2.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	150 laporan		150 laporan	150 Laporan	541,768,300	150 laporan	1.013.679.293
	2.11.01.2.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	640.000.000	1 Dokumen	264.600.000
	2.11.01.2.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	<i>Persentase realisasi pengadaan barang milik Daerah sesuai RKBU</i>	100%		100%	100%	14,710,556,048	100%	24.786.568.226
	2.11.01.2.07.02	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN								
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	97 unit		97 unit	28 Unit	8,873,773,000	97 unit	20.186.568.226
	2.11.01.2.07.0003	PENGADAAN ALAT BESAR								
			<i>Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan</i>	1 Unit		0	1 Unit	4.680.000.000	1 Unit	4.200.000.000
	2.11.01.2.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	30 unit		56 unit	114 Unit	1,156,783,048	30 unit	400.000.000
	2.11.01.2.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Cakupan pelaksanaan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100%		100%	100%	1,102,414,975	100%	1.172.782.541
	2.11.01.2.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 laporan		1 laporan	1 Laporan	31,400,000	1 laporan	5.512.500
	2.11.01.2.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 laporan		3 laporan	3 Laporan	300.487.575	3 laporan	369.084.957
	2.11.01.2.08.04		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR							
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	13 laporan		13 laporan	13 Laporan	770.527.400	13 laporan	798.185.084
	2.11.01.2.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara sesuai dokumen perencanaan</i>	100%		100%	100%	11,731,540,683	100%	11.826.631.618
	2.11.01.2.09.01		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN							
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	5 unit		6 unit	6 Unit	226.280.000	5 unit	226.861.425
	2.11.01.2.09.02		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN							
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	56 unit		76 unit	61 Unit	9.717.610.000	56 unit	10.599.170.400
	2.11.01.2.09.06		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA							
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	120 unit		71 unit	160 Unit	401,700,000	120 unit	338.302.125
	2.11.01.2.09.09		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA							
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 unit		2 unit	3 Unit	1,122,520,683	3 unit	519.457.768
	2.11.01.2.09.11		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA							
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	34 unit		77 unit	82 Unit	263,430,000	34 unit	142.839.900
	2.11.01.2.13	PENATAAN ORGANISASI	<i>Persentase Cakupan Penataan Organisasi</i>	100%		100%	100%	108.000.000	100%	88.200.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.11.01.2.13.03	PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI								
			<i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	108.000.000	40 Dokumen	88.200.000
3	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang terselesaikan secara efektif</i>	100%		80%	100%	578,834,320	100%	400.787.636
	2.11.02.2.01	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia</i>	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	243,600,000	2 Dokumen	400.787.636
	2.11.02.2.01.01	PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/ KOTA								
			<i>jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi</i>	4 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	243,600,000	2 Dokumen	400.787.636
	2.11.02.2.02	PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	<i>Cakupan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara memadai</i>	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	335,234,320	1 Dokumen	0
	2.11.02.2.02.02	PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD								
			<i>Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun</i>	0 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	335,234,320	0	0
4	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase dokumen atau laporan pencegahan pencemaran lingkungan hidup</i>	100%		100%	100%	5,075,724,570	100%	5.874.266.986
	2.11.03.2.01	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah Dokumen / Laporan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang Tersedia</i>	2 laporan		13 laporan	3 Laporan	4,719,784,170	8 laporan	5.593.432.673
	2.11.03.2.01.01	KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	8 Dokumen		8 Dokumen	11 Dokumen	3,041,462,630	8 Dokumen	1.785.073.494
	2.11.03.2.01.02	KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	4 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	464,156,540	4 Dokumen	638.896.699
	2.11.03.2.01.03	PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA								
			<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	1.214.165.000	4 Dokumen	3.169.462.480
	2.11.03.2.02	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	<i>persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditanggulangi</i>	100%		50%	100%	340,040,400	100%	275.101.313
	2.11.03.2.02.01	PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT								
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>	1 laporan		2 laporan	2 Laporan	340,040,400	1 laporan	275.101.313
	2.11.03.2.03	PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	<i>persentase pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dipulihkan</i>	50%		50%	45%	15.900.000	50%	5.733.000
	2.11.03.2.03.01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerin-tah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya</i>	1 Dokumen		20 Dokumen	1 Dokumen	15.900.000	1 Dokumen	5.733.000

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i>							
5	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks kualitas tutupan lahan	31,61 Indeks		30.27 Nilai	30	1,223,696,000	31,61 Indeks	1.136.819.300
	2.11.04.2.01	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	<i>Luas Taman Keaneekaragaman Hayati yang dikelola dengan baik</i>	2 Ha		4 Ha	1 Ha	1,223,696,000	2 Ha	1.136.819.300
	2.11.04.2.01.04	PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)								
			<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	3 Ha		5 Ha	3 Ha	471.756.000	3 Ha	221.029.200
	2.11.04.2.01.09	PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI LUAR KAWASAN HUTAN								
			<i>Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Ha		4 Ha	1	751,940,000	1 Ha	850.000.000
6	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%		80%	0%	151,500,000	100%	284.114.250
	2.11.05.2.01	PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	<i>Persentase pengendalian penyimpanan sementara limbah B3</i>	100%		50%	0%	151,500,000	100%	284.114.250
	2.11.05.2.01.01	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK								
			<i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	0	151,500,000	1 Dokumen	56.778.750

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
7	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	<i>Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</i>	100%		80%	90%	53.700.000	100%	617.595.980
	2.11.06.2.01	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha/persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, PUU dan PPLH</i>	100%		80%	90%	53.700.000	100%	617.595.980
	2.11.06.2.01.01	FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH								
			<i>Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan</i>	100 Dokumen		130 Dokumen	40 Dokumen	300.000	100 Dokumen	194.207.999
	2.11.06.2.01.03	PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP								
			<i>Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi</i>	200 Badan Usaha		200 laporan	200 Badan Usaha	53.400.000	200 Badan Usaha	423.387.981
8	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase lembaga/ kelompok masyarakat yang difasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup</i>	100%		95%	90%	1,397,095,100	100%	1.069.526.139

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.11.08.2.01	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	<i>Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang terlaksana</i>	1 Kegiatan		1 Kali	1 Kegiatan	1,397,095,100	1 Kegiatan	1.069.526.139
	2.11.08.2.01.02	PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP								
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	5 Dokumen		5 Dokumen	8 Kegiatan	485,208,900	5 Dokumen	271.210.234
	2.11.08.2.01.03	PENYELENGGARAAN PENYULUHAN DAN KAMPANYE LINGKUNGAN HIDUP								
			<i>Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat</i>	2250 orang		1500 orang	2250	911,886,200	2250 orang	760.815.905
9	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	<i>Persentase penghargaan lingkungan hidup</i>	100%		80%	90%	228,754,000	100%	355.000.000
	2.11.09.2.01	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup</i>	5 Kegiatan		3 Kali	4 Kegiatan	228,754,000	5 Kegiatan	355.000.000
	2.11.09.2.01.01	PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP								
			<i>Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH</i>	400 Entitas		750 Entitas	400 Entitas	228,754,000	400 Entitas	355.000.000
10	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	<i>Persentase Peningkatan penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	100%		100%	100%	115.070.000	100%	101.962.476

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.11.10.2.01	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</i>	100%		100%	100%	115.070.000	100%	101.962.476
	2.11.10.2.01.04	PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/ KOTA								
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani</i>	50 Pengaduan		50 Dokumen	50 Pengaduan	84.170.000	50 Pengaduan	101.962.476
	2.11.10.2.01.06	PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA								
			<i>Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota</i>	0			50 Perkara	30.900.000	0	0
11	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Persentase volume sampah yg terkelola</i>	74%		72%	73%	10,433,206,340	74%	12.253.818.431
	2.11.11.2.01	PENGELOLAAN SAMPAH	<i>Timbulan sampah yang terkelola</i>	70%		72%	71%	10,433,206,340	70%	12.253.818.431
	2.11.11.2.01.04	PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
			<i>Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat</i>	85 Kelompok		85 Kelompok	10 Kelompok	1,101,200,000	85 Kelompok	1.348.912.058
	2.11.11.2.01.05	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak</i>	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	1.332.234.800	1 Dokumen	2.591.005.095

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada</i>							
	2.11.11.2.01.03	PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN DAN PENGOLAHAN SAMPAH DI INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, PUSAT PENGOMPOSAN, BIODIGESTER, BANK SAMPAH DAN FASILITAS LAINNYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN								
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan</i>	675000 ton		547000 ton	82125 Ton	7,164,003,540	675000 ton	7.896.990.903
	2.11.11.2.01.02	PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATAAN TIMBULAN SAMPAH								
			<i>Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah</i>	1 laporan		2 laporan	1 Laporan	835,768,000	1 laporan	416.910.375
		JUMLAH						99.758.241.730		111.813.525.360

Rancangan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini merupakan rencana kerja tahunan dan ini merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2021-2026 ini merupakan pedoman bagi segenap aparatur untuk melaksanakan kegiatan dan memudahkan dalam pengendalian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Tahun 2025 yang telah disusun Tahun anggaran 2024 ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan telah mempunyai arah yang jelas dalam melaksanakan program dan kegiatan dan apa yang akan dikerjakan dalam satu tahun ini nantinya dapat mencapai sasaran dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam perjalanan waktu, tidak tertutup kemungkinan Rencana Kerja ini akan mengalami perubahan mungkin dapat dikarenakan beberapa faktor misalnya peraturan dari pusat, kebijakan-kebijakan bidang lingkungan hidup, kebutuhan/kepentingan organisasi yang perlu adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada. Namun demikian akan diupayakan agar perubahan-perubahan yang dilakukan tidak terlalu jauh dari garis besar perencanaan yang telah disusun.